

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang ada pada bagian ini berfungsi menjadi salah satu acuan bagi penulis didalam melakukan penelitian yang saat ini sedang dilakukan, sehingga nantinya penulis dapat memperkaya kajian teori yang akan digunakan dalam mengkaji penelitian yang sedang penulis lakukan berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam mendeskripsikan hasil temuan yang ada ataupun penelitian yang dilakukan di lapangan.

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Anita Sulistiyaning Gunawan, Djamhur Hamid, dan Maria Goretti Wi Endang N.P pada tahun 2016 lalu yang berjudul analisis pengembangan pariwisata terhadap sosial ekonomi masyarakat (studi pada wisata religi Gereja Puhsarang Kediri) memiliki hasil penelitian, yaitu strategi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata di dalam pengembangan kawasan objek Wisata Puhsarang di Kabupaten Kediri yang *pertama* adalah peningkatan kegiatan promosi pariwisata Religi Puhsarang. *Kedua* yaitu pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana untuk menunjang dari pengembangan wisata, dan yang *ketiga* adalah peningkatan peran serta masyarakat untuk meningkatkan keamanan kebersihan dan kenyamanan serta sebagai sarana peningkatan ekonomi yang dapat digunakan oleh masyarakat sekitar.(Gunawan, Hamid, and Wi Endang N.P 2016)

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Bories Yasin Abdillah, Djamhuri Hamid, dan Topowijono pada tahun 2016 yang berjudul dampak pengembangan pariwisata terhadap kehidupan masyarakat lokal di kawasan wisata (studi pada masyarakat sekitar Wisata Wendit, Kabupaten Malang)

memiliki hasil penelitian yaitu bahwasanya pengembangan pariwisata memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat sekitar Taman Wisata Air Wendit. Pemerintah telah melakukan banyak perubahan dengan cara melengkapi fasilitas wisata serta wahana-wahana permainan yang menjadi daya tarik dari Taman Wisata Air Wendit. Selanjutnya yaitu dampak yang ditimbulkan dari pengembangan pariwisata air wendit pada bidang sosial adalah meningkatnya keterampilan masyarakat dengan membuat cendramata, transformasi norma yang terjadi dari norma negatif ke norma positif, serta adanya penyerapan tenaga kerja dari masyarakat desa yang mendorong masyarakat desa untuk berwirausaha serta meningkatkan pendapatan dari wirausaha yang dimiliki oleh masyarakat. (Akhmad Bories Yasin Abdillah, Djamhur Hamid 2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Hadi Sri Utami pada tahun 2017 berjudul pengelolaan kawasan pariwisata (studi di Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru) memiliki hasil penelitian, yaitu dalam pengelolaan kawasan pariwisata Gunung Bromo perlu mengintegrasikan dengan pengembangan daerah penyangga maupun keterpaduan program pengembangan ekowisata pada Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dengan melakukan program kegiatan pengembangan pariwisata di daerah penyangga. Hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi peran positif dari masing-masing stakeholder dalam bentuk sinergi kolaboratif dalam pengelolaan kawasan pariwisata di Gunung Bromo misalnya melalui penyusunan rencana pengelolaan kawasan, pembinaan daya dukung dari kawasan, pengembangan sumber daya manusia dalam rangka pengembangan kawasan, pembangunan sarana prasarana penunjang, dan partisipasi dari masyarakat. Dalam hal koordinasi, pendelegasian presensi forum koordinasi

dengan *stakeholder* seharusnya dilakukan dengan disertai dengan pendelegasian kewenangan untuk mengambil keputusan agar tidak menghambat dari pencapaian tujuan. (Utami 2017)

Berdasarkan jurnal yang dibuat oleh Hary Hermawan pada tahun 2016 yang berjudul dampak pengembangan Desa Wisata Nglanggeran terhadap ekonomi lokal masyarakat memiliki hasil bahwasanya pengembangan Desa Wisata Nglanggeran dinilai cukup baik, indikator utamanya adalah rata-rata kenaikan kunjungan wisatawan yang cukup besar dari tahun ke tahun. Kesiapan masyarakat lokal yang ditinjau dari tingkat pendidikan, pengetahuan, serta tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengembangan desa wisata bahwasanya masyarakat telah cukup siap menghadapi berbagai potensi dampak yang muncul, serta seharusnya telah mampu memaksimalkan potensi berupa peluang ekonomi berupa peluang ekonomi yang tercipta dengan adanya pengembangan Desa Wisata Nglanggeran. Hasil lainnya menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata membawa dampak yang positif bagi pengembangan ekonomi masyarakat lokal di Desa Nglanggeran diantaranya : meningkatkan penghasilan masyarakat Desa Nglanggeran, peningkatan peluang kerja dan berusaha masyarakat lokal di sektor pariwisata, dengan peraturan lokal yaitu pembatasan investasi asing yang masuk berdampak pada meningkatkan kepemilikan kontrol masyarakat lokal serta kebanggaan untuk bekerja dan berusaha di desanya sendiri, dan yang terakhir adalah pendapatan pemerintah melalui retribusi. (Hermawan 2016)

Penelitian Anom Hery Suasapha pada tahun 2016 yang berjudul implementasi konsep pariwisata berbasis masyarakat dalam mengelola Pantai Kedonganan dapat disimpulkan bahwa implementasi konsep pariwisata berbasis masyarakat di Pantai

Kedonganan dilakukan dalam dua tahap. Tahap I terdiri atas delapan langkah sedangkan Tahap II terdiri atas tiga langkah. Dalam dua tahap penataan tersebut diimplementasikan empat prinsip pariwisata berbasis masyarakat yaitu prinsip partisipasi masyarakat, konservasi lingkungan, konservasi sosialbudaya, dan ekonomi lokal. Implementasi didukung oleh lima faktor, sedangkan faktor penghambatnya ada dua. Model CBT yang diimplementasikan menunjukkan hubungan keterkaitan antara Pemerintah dengan Desa Adat sebagai pihak yang diizinkan oleh Pemerintah untuk mengelola kepariwisataan Pantai Kedonganan, dalam bentuk pengelolaan kawasan Pantai Kedonganan dan 24 kafe yang ada. Model hipotetis tersebut menunjukkan penerapan empat prinsip pariwisata berbasis masyarakat yang diawasi oleh BPKP2K, yaitu badan pengelola Kawasan Pantai Kedonganan. (Suasapha 2016)

Jurnal yang dibuat oleh Chintiya Betari Avinda, I Nyoman Sudiarta, Ni Made Oka Karini pada tahun 2016 tentang strategi promosi Banyuwangi sebagai destinasi wisata (studi kasus pada dinas kebudayaan dan pariwisata) memiliki hasil penelitian Strategi promosi dari Kabupaten Banyuwangi adalah corporate strategy dimana pembuat dan penyusun strategi adalah manajemen puncak yang dalam hal ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Pelaksanaan strategi promosi dilakukan dengan menggunakan bauran promosi (*promotion mix*) yang terdiri dari 4 saluran promosi yang dibaurkan. Dengan menggunakan periklanan, promosi penjualan, pemasaran langsung, dan hubungan masyarakat yang dibaurkan menjadi sebuah strategi promosi telah mampu meningkatkan kunjungan wisatawan ke Banyuwangi. Namun hal tersebut belum dibarengi dengan meratanya persebaran wisatawan ke daya tarik wisata yang sampai saat ini masih

terfokus kepada daya tarik wisata alam.(Betari Avinda, Sudiarta, and Oka Karini 2016)

Penelitian Theresia Octastefani, Bayu Mitra Adhyatma Kusuma pada tahun 2015 tentang Peran Pemerintah Kabupaten Malang Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah Melalui Sektor Pariwisata memiliki hasil yaitu Untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerah melalui obyek wisata Pantai Balekambang, Pemerintah Kabupaten Malang telah berupaya untuk dapat menjalankan peranannya sebagai entrepreneur, koordinator, fasilitator dan stimulator dengan semaksimal mungkin. Dimana dari keempat peran yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerah. Sebagai entrepreneur, pemerintah Kabupaten Malang mampu meningkatkan PAD melalui sektor pariwisata dari tahun ke tahun. Sebagai koordinator, Pemerintah Kabupaten Malang telah berhasil menciptakan perencanaan yang terpadu dalam pengembangan Pariwisata melalui RPJMD 2010-2015 dan Perda No. 8 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Jasa Yasa yang mengelola sektor Pariwisata. Sebagai fasilitator, pemerintah Kabupaten Malang memfokuskan pembangunan pariwisata yang diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur Jalan Lintas Selatan (JLS) dan pengembangan wilayah. Dan sebagai stimulator, Pemerintah Kabupaten Malang mampu menarik para investor untuk berinvestasi di sektor pariwisata dengan Perusahaan Daerah Jasa Yasa selaku pengelola.(Octastefani, Theresia 2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Ryu Akbar Devison, Lita Tyesta, Ratna Herawati pada tahun 2017 yang memiliki fokus pada Tugas Dan Fungsi Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Sukabumi Dalam

Pengelolaan Objek Wisata Abstrak memiliki hasil penelitian yaitu Tugas dan Fungsi dari Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Sukabumi dalam pengelolaan objek wisata yaitu pembangunan infrastuktur, pengelolaan aktifitas promosi pariwisata, pengembangan sarana dan prasarana pariwisata, pengelolaan objek dan daya tarik pariwisata, pemantauan dan evaluasi pengelolaan pariwisata dan peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan pariwisata di Kota Sukabumi. Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Sukabumi dalam pengelolaan objek wisata terjabarkan dalam Renstra Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Sukabumi Tahun 2013 – 2018 akan membangun beberapa sarana dan prasarana pemuda olahraga dan pariwisata diantaranya gor di 7 (tujuh) Kecamatan, kolam renang di komplek suryakencana, water boom di taman rekreasi Santa, gedung kesenian di kawasan Santa, pusat kreatifitas seni dan pemuda di kawasan Santa, kawasan wisata Cikundul. Dalam Renstra Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Sukabumi Tahun 2013 – 2018 juga melakukan pengembangan pemasaran pariwisata berupa peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata, pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata, koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata, pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan statistik kepariwisataan, pelatihan Pemandu wisata terpadu. Pengembangan destinasi pariwisata dalam Renstra Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Sukabumi Tahun 2013 – 2018 berupa pengembangan objek pariwisata unggulan, peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata,

pengembangan jenis dan paket wisata unggulan, pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi.(Devison, Tyesta, and Herawati 2017)

Berdasarkan pada penelusuran penelitian terdahulu yang sudah disajikan dalam narasi yang berada diatas, maka penelitian mengenai *Economic Developmen* pada pengembangan pariwisata berbasis budaya dan alam yang studi kasusnya berada di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang memiliki perbedaan yang berada di dalamnya, hal ini diantaranya sebagai berikut: Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yang mengenai pengembangan ekonomi melalui bidang pariwisata budaya dan alam yang ada di Desa Ngadas, yang dimana penelitian ini akan terfokus kepada bagaimana pembangunan pariwisata yang ada di Desa Ngadas dan bagaimana dampak pembangunan ekonomi yang ada di Desa Ngadas. Berbeda dengan penelitian yang terdahulunya kurang membahas secara spesifik bagaimana pembangunan pariwisata dan dampak pembangunan ekonomi yang ditimbulkan pada Desa Ngadas.

B. *Economic Development*

Penjelasan tentang *Economic Development* atau pembangunan ekonomi telah banyak dijabarkan oleh para ahli yang memiliki keahlian dalam bidng ekonomi. Menurut Todaro, pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Beberapa kriteria pengukuran keberhasilan pembangunan ekonomi di antaranya adalah: pendapatan nasional, pendapatan per kapita, distribusi

pendapatan, peranan sektor industri dan jasa, kesempatan kerja, stabilitas ekonomi, dan neraca pembayaran luar negeri. (Dr. Suryana, 2000)

Menurut Sukirno (2002), pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita riil penduduk di suatu daerah meningkat dalam jangka waktu yang panjang. Di sini ada dua aspek penting yang saling berhubungan erat yaitu pendapatan total atau yang lebih dikenal dengan pendapatan nasional dan jumlah penduduk. Pendapatan perkapita sendiri merupakan pendapatan total yang dibagi dengan jumlah penduduk.

Terdapat empat model pembangunan (Suryana, 2000) yaitu model pembangunan ekonomi yang berorientasikan pada pertumbuhan, terciptaan lapangan kerja, penghapusan atau penurunan tingkat kemiskinan dan model pembangunan ekonomi yang berorientasi kepada pemenuhan dari kebutuhan dasar, berdasarkan dari model pembangunan tersebut, semua itu memiliki tujuan pada perbaikan dari kualitas hidup, peningkatan barang dan jasa, penciptaan lapangan kerja baru dengan upah yang layak, dengan harapan tercapainya tingkat hidup minimal untuk setiap rumah tangga.

1. *Local Economic Development*

Local Economic Development (LED) merupakan proses jalinan kepentingan yang terjadi antara pemerintah, swasta, produsen, dan masyarakat dengan mengoptimalkan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam lokal (*Endogenous Development*) dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja (Blakely, 1991). Dalam Pembangunan Ekonomi Lokal (PEL) terkandung beberapa misi kegiatan didalamnya yaitu seperti pengembangan usaha dan

ekonomi daerah, wahana tempat partisipasi masyarakat, pemberdayaan dari produsen atau masyarakat, pengentasan angka kemiskinan, transparansi, akuntabilitas, dan kerjasama regional yang bersifat lintas sektoral (Alizar et al., 2002).

Pengembangan Ekonomi Lokal dijelaskan sebagai salah satu upaya dalam optimalisasi sumber daya lokal dengan adanya campur tangan pemerintah, pelaku usaha, masyarakat lokal serta organisasi masyarakat madani dalam pengembangan ekonomi pada suatu wilayah. Blakely (1989) mengatakan bahwa pengembangan ekonomi lokal merupakan proses pengelolaan sumberdaya yang ada oleh pemerintah daerah atau kelompok masyarakat. Pemerintah daerah atau kelompok masyarakat tersebut berperan dalam menjalin kerjasama (partnership) dengan sektor swasta atau pihak-pihak lain, penciptaan kesempatan kerja dan berperan dalam upaya meningkatkan kegiatan ekonomi lokal sesuai dengan zona perekonomian yang telah ditetapkan. Kebijakan pengembangan endogen (endogen development) merupakan dasar dari karakteristik utama pengembangan ekonomi lokal. Kebijakan ini menggunakan potensi lokal berupa sumber daya manusia, kelembagaan, dan fisik. Blakely menjelaskan pula bahwa pemerintah daerah, lembaga masyarakat serta pihak swasta adalah partner penting dalam upaya mengembangkan perekonomian lokal. Teori pengembangan ekonomi lokal secara ringkas dijelaskan sebagai suatu teori mengenai pengembangan perekonomian lokal melalui pemanfaatan potensi sumber daya lokal, penciptaan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, peningkatan perekonomian lokal, dan keberlanjutan usaha. Coffey and Polase dalam Blair (1985) menjelaskan proses dasar perkembangan perekonomian lokal yang meliputi : (1) kewiraswastaan (entrepreneurship) local

mengalami pertumbuhan; (2) perusahaan-perusahaan lokal lepas landas (take off); (3) perusahaan-perusahaan mengembangkan usahanya hingga keluar wilayah; dan (4) pembentukan perekonomian lokal berdasarkan kegiatan dan inisiatif lokal serta keunggulan komparatif aktifitas ekonomi lokal tersebut. Tujuan utama daerah dalam pembangunan ekonomi adalah upaya peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat daerah. Pemerintah daerah serta masyarakat lokal diharuskan dengan bersamaan memberikan inisiatif pembangunan daerah dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Pengembangan ekonomi lokal memerlukan suatu pemetaan sebagai penentu strategi pembangunan penentuan daya saing nasional.

Proses Local Economic Development (LED) merupakan proses jalinan kepentingan antara pemerintah, swasta, produsen, dan masyarakat dengan mengoptimalkan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam lokal (endogenous development) dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja (Blakely, 1991 dalam Iqbal dan Anugrah, 2009).

Alizar et al. (2002) menekankan bahwa dalam implementasinya, PEL perlu diwujudkan dalam kemitraan, atau disebut dengan istilah KPEL (Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal). Kemitraan menjadi penting dan mendasar dalam rangka memanfaatkan potensi sumberdaya suatu daerah, mengingat pemerintah sendiri memiliki keterbatasan (terutama dana) sehingga memerlukan kontribusi sektor swasta dan masyarakat dalam pembangunan. Sekaligus, kemitraan dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengurangi dominasi sektor tertentu dalam proses perencanaan kebijakan terpadu.

Edward J. Blakely (1994), mendefinisikan *Local Economic Development* “ = f (natural resources, labor, capital, investment, entrepreneurs, transport, communication, industrial composition, technology, size, export market, international economic situation, local government capacity, national dan state government spending and development supports). All of these factors may be important. However, the economic development practitioner is never certain which factor has the greatest weight in any given situation”. Lebih lanjut beliau menyebutkan bahwa “..... The central feature of locally based economic development is in the emphasis on endogenous development using the potential of local human and physical resources to create new employment opportunities and to stimulate new, locally based economic activity”.

Sementara itu, The World Bank (2001) mendefinisikan “.....*Local Economic Development (LED)* is the process by which public, business and non governmental sector partners work collectively to create better conditions for economic growth and employment generation”. The aim is to improve the quality of life for all. Practicing local economic development means working directly to build the economic strength of all local area to improve its economic future and the quality of life of its inhabitants. Prioritizing the local economy is crucial if communities today depends upon them being able to adopt to the fast changing and increasingly competitive market environment”.

Dilihat dari sisi masyarakat, Pengembangan Ekonomi Lokal diartikan sebagai upaya untuk membebaskan masyarakat dari semua keterbatasan yang menghambat usahanya guna membangun kesejahteraannya. Kesejahteraan tersebut dapat diartikan secara khusus sebagai jaminan keselamatan bagi adat istiadat dan

agamanya, bagi usahanya, dan bagi harga dirinya sebagai manusia. Semua jaminan tersebut tidak dapat diperoleh dari luar sistem masyarakat karena tidak berkelanjutan, dan oleh karena itu harus diupayakan dari sistem masyarakat itu sendiri yang kerap kali disebut kemandirian. Dengan demikian, pembangunan ekonomi lokal merupakan upaya pemberdayaan masyarakat ekonomi dalam suatu wilayah dengan bertumpukan kepada kekuatan lokal, baik itu kekuatan nilai lokasi, sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, kemampuan manajemen kelembagaan (*capacity of institutions*) maupun asset pengalaman (Haeruman, 2001).

Selain di tingkat pusat, permasalahan program dan kegiatan *Local Economic Development* (LED) juga terjadi pada tingkat lokal. Program dan kegiatan *Local Economic Development* (LED) di tingkat lokal relatif terfokus pada investasi publik bagi daerah-daerah sentra produksi komoditas unggulan dan programnya berorientasi pada sisi penawaran dan produksi, sementara sisi pemasaran terabaikan. Program dan kegiatan *Local Economic Development* (LED) di tingkat lokal juga ditandai dengan kurangnya partisipasi masyarakat dan melibatkan hampir semua dinas terkait sehingga sering terjadi tumpang tindih program dan tidak adanya kewenangan yang jelas terhadap program yang dibuat (Supriyadi, 2007).

Dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh pembangunan pedesaan dan berbagai pengalaman kegagalan proyek pemerintah, diperlukan sebuah pendekatan baru yang mampu mensinergikan antara pembangunan pedesaan dan peningkatan daya saing yang mampu memberdayakan ekonomi lokal. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan ini adalah *Local*

Economic Development (LED) atau pembangunan ekonomi lokal. *Local Economic Development* (LED) berusaha melakukan upaya pemanfaatan sumber daya yang ada yaitu sumberdaya fisik, manusia dan kelembagaannya. Dalam istilah lain, *Local Economic Development* (LED) merupakan pemanfaatan faktor-faktor internal lokal guna untuk pengembangan ekonomi lokal (Supriyadi, 2007). Dengan pendekatan ini diharapkan akan ada sinergi antara pembangunan pedesaan yang menyeluruh dan mampu meningkatkan daya saing desa.

Tarigan (2002) menjelaskan bahwa teori basis ekonomi mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Perekonomian regional dapat dibagi menjadi dua sektor, yaitu kegiatan basis dan bukan basis. Kegiatan basis adalah mengekspor barang dan jasa ke tempat-tempat di luar batas-batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan kegiatan bukan basis adalah kegiatan yang tidak mengekspor, yakni hanya kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan di dalam daerah itu sendiri.

Bertambah banyaknya kegiatan basis di dalam suatu daerah akan menambah permintaan terhadap barang dan jasa di dalamnya dan menimbulkan kenaikan volume kegiatan bukan basis. Sebaliknya, berkurangnya kegiatan basis akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang mengalir masuk ke dalam daerah yang bersangkutan dan turunya permintaan terhadap produk dari kegiatan bukan basis. Dengan demikian kegiatan basis ekonomi mempunyai peranan sebagai penggerak pertama (*primer mover rule*), sedangkan setiap perubahan mempunyai “efek multiplier” terhadap perekonomian regional, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk mengetahui sektor basis dan bukan basis antara lain

menggunakan metode analisis *location quotient* (LQ). (Triuwono & Yustika, 2003).

Paradigma pembangunan mempunyai empat komponen esensial (Alhumami, 2005). Menurut Alhumami (2005) keempat komponen tersebut yaitu:

1. Kesetaraan yang merujuk pada kesamaan dalam memperoleh akses ke sumber daya ekonomi dan politik yang menjadi hak dasar warga negara.
2. Produktivitas yang merujuk pada usaha-usaha sistematis yang bertujuan meningkatkan kegiatan ekonomi.
3. Pemberdayaan yang merujuk pada setiap upaya membangun kapasitas masyarakat dengan cara melakukan transformasi potensi dan kemampuan, sehingga masyarakat memiliki kemandirian, otonomi, dan otoritas dalam melaksanakan pekerjaan dan mengatasi permasalahan sosial.
4. Berkelanjutan yang merujuk pada strategi dalam mengelola dan merawat modal pembangunan seperti fisik, manusia, finansial, dan lingkungan agar bisa dimanfaatkan guna mencapai tujuan utama pembangunan yaitu kesejahteraan rakyat.

2. *Community Based Tourism (CBT)*

Menurut Hudson dan Timothy dalam Sunaryo (2013:139) pariwisata berbasis masyarakat atau *Community Based Tourism (CBT)* merupakan pelibatan masyarakat dengan kepastian manfaat yang diperoleh oleh masyarakat melalui upaya perencanaan pendampingan yang membela masyarakat lokal serta kelompok lain yang memiliki antusias atau minat kepada kepariwisataan, dengan pengelolaan pariwisata yang memberikan peluang lebih besar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat setempat (Neno Rizkianto 2018). Dengan begitu CBT merupakan suatu

pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh masyarakat atau orang yang memiliki ketertarikan pada bidang pariwisata dengan tujuan untuk menjalankan perekonomian yang ada di daerah itu bertujuan untuk meningkatkan tingkat ekonomi dari masyarakat yang terdapat di daerah tersebut.

Konsep tersebut mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi mereka dengan tetap menjaga kualitas lingkungan, serta melindungi kehidupan sosial dan budayanya, sehingga implementasinya mampu mendukung tercapainya tiga pilar keberlanjutan (*the three pillars of sustainability*) yaitu keberlanjutan di bidang ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan (Asker et al, 2010). Prinsip-prinsip tersebut adalah (1) prinsip partisipasi masyarakat, (2) prinsip konservasi alam, (3) prinsip ekonomi lokal, dan (4) prinsip konservasi sosial-budaya (Suasapha 2016). Dengan adanya konsep tersebut maka pengembangan ekonomi lokal yang berbasis pada masyarakat tidak hanya mementingkan aspek ekonomi dari masyarakat saja, tetapi juga melihat dari berbagai faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi yang ada di masyarakat baik sekarang ataupun yang akan terjadi di masa yang akan datang baik itu aspek sosial budaya yang ada di masyarakat ataupun tentang konservasi alam yang ada pada tempat dilakukannya pengembangan ekonomi lokal.

Keterlibatan masyarakat dalam konsep CBT sendiri masyarakat dapat dikatakan sudah terlibat dalam pelaksanaan apabila masyarakat yang ada di daerah diikuti dalam pengambilan keputusan dan merasakan dampak ekonomi yang terjadi setelah program yang berkaitan dengan CBT dilaksanakan.